

**ANALISIS PENGARUH POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DIEASE 2019 TERHADAP PEMBIAYAAN PT. BPRS MITRA AGRO
USAHA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

RACHMAD AFRIZAL
NPM : 1651020172



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**ANALISIS PENGARUH POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS
DIEASE 2019 TERHADAP PEMBIAYAAN PT. BPRS MITRA AGRO
USAHA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

RACHMAD AFRIZAL
NPM : 1651020172

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hanif S.E.,M.M.

Pembimbing II : Rosydalina Putri, M.S.,Ak., Akt.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Awal tahun 2020 dunia mengalami pandemik Covid-19, wabah ini berdampak pada sosial dan ekonomi negara termasuk Indonesia yang sempat mengalami penurunan diperkirakan dapat menuju 2,3% dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Untuk mendorong optimalisasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah menerbitkan suatu peraturan yaitu POJK nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk meringankan perekonomian UMKM. Pembiayaan merupakan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Namun, dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini debetur kesulitan untuk melunasi pembiayaan dikarenakan penghasilan yang menurun. Dalam praktik pelaksanaannya POJK nomor 11 Tahun 2020 ini merestrukturisasi pembiayaan seperti pembiayaan nasabah yang terdampak Covid 19 pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana restrukturisasi pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diambil dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nasabah pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga financial intermediary system tetap terjaga dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menyelenggarakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang terkena dampak Covid-19 dengan maksud agar nasabah pembiayaan tetap bisa mengangsur dan mencukupi kebutuhan pokoknya. Dari keterangan yang diberikan oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang mendapat keringanan penundaan atau perpanjangan waktu atas pelunasan pembiayaannya. Dengan pola restrukturisasi 25% dari angsuran nasabah yang sebelumnya adalah Rp. 890.000 menjadi Rp. 667.500 dengan selisih Rp. 222.500 selama sebulan dan juga nasabah mendapat perpanjangan waktu pelunasan selama 4 bulan dari yang sebelumnya adalah 18 bulan ditambah 4 bulan menjadi 22 bulan waktu pelunasan pembiayaan. Dengan demikian, POJK nomor 11 tahun 2020 ini adalah solusi yang tepat karena selain membantu perekonomian UMKM POJK nomor 11 tahun 2020 ini juga bisa menjadi stimulus ekonomi juga berperan sebagai kebijakan Countercyclical pada masa pandemik Corona Virus Disease 2019.

Kata kunci : POJK, pembiayaan, BPRS Mitra Agro Usaha

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RACHMAD AFRIZAL**
NPM : **1651020172**
Jurusan/Prodi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh POJK Nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juni 2021

Penulis,



RACHMAD AFRIZAL

NPM. 1651020172



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung.Telp.(0721) 780887 Kodepos:35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PEMBIAYAAN PT.BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Nama : Rachmad Afrizal
NPM : 1651020172
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Hanif, S.E. M.M.
NIP. 19740823200031001

Pembimbing II

Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP.198710182018012001

Ketua Jurusan

Dr. Erle Andraeni, M.E.Sy.
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung.Telp.(0721) 780887 Kodepos:35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh POJK Nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pembiayaan PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”** disusun oleh **Rachmad Afrizal, NPM. 1651020172** Program Studi **Perbankan Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua :Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si.

(..........)

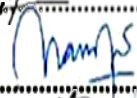
Sekretaris :Ahmad Hazas Syarif, S.E.I, M.E.I

(..........)

Penguji I:Dr. Syamsul Hilal, M.Ag

(..........)

Penguji II:Dr. Hanif, S.E., M.M

(..........)

Penguji III :Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt

(..........)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

“Where you want to go and how much are you a risk”

Kemanakah kamu akan pergi dan seberapa besar resikonya
(The chainsmokers & coldplay - Something just like this)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia,
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah
senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong
saudaranya”.
(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Alva Edison dan Ibu Salwani sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ku selama menempuh pendidikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.
2. Yang tersayang Kakak Ku Nanda Yunita Ariyani, Aditya Chindo Daioza, Adikku M. Julius Fajar, Diana Putri, dan Irma Yuni yang selalu menghibur, memberikan semangat, memberikan doa serta motivasi selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidikku baik dari segi ilmu maupun agama.

RIWAYAT HIDUP

Rachmad Afrizal lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 April 1997. Anak ketiga dari enam bersaudara atas pasangan Bapak Alva Edison dan Ibu Salwani.

Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari TK. Dewi Sartika Subumi Bandar Lampung dimulai dari tahun 2002 dan selesai tahun 2003 kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukabumi Bandar Lampung, dimulai pada tahun 2003 selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung, dimulai pada tahun 2010 selesai pada tahun 2013 kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dimulai pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016. pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung dengan mengambil. Jurusan Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021
Penulis

Rachmad Afrizal
NPM1651020172

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh POJK Nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Terhadap Kredit / Pembiayaan Nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi Perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016 kelas A yang selalu kebersamai dalam proses belajar dan saling mendo'akan satu sama lain sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dalam menulis skripsi. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Kepada Allah SWT. Kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak, Khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya Aamiin. Saya berharap hasil peneltian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan penyempurnaan penelitian selanjutnya, khususnya ilmu ekonomi dan bisnis islam.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021
Penulis

Rachmad Afrizal
NPM.1651020172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Kerangka Penelitian.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	17
2. Stimulus Perekonomian.....	22
3. Kebijakan Countercyclical.....	23
4. Pembiayaan.....	25
5. Restrukturisasi	35
B. Tinjauan Pustaka.....	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	45
2. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	47
3. Produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha	48
B. Deskripsi Data Penelitian.....	49
1. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.3/2020	49
2. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo1 11/POJK.3/2020.....	50
3. Mekanisme Pengajuan Restrukturisasi Dampak Covid 19	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan PT.BPRS MAU Bandar Lampung.....	53
1. Pembiayaan Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	53
2. Analisis Pembiayaan Sebelum Ditetapkannya POJK Nomor 11 Tahun 2020.....	56
3. Analisis Setelah Ditetapkannya POJK nomor 11 Tahun 2020	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tinjauan Pustaka.....	40
Tabel 1.2	Nasabah Non Pembiayaan PT BPRS MAU Bandar Lampung.....	54
Tabel 1.3	Nasabah Pembiayaan PT BRPS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	55
Tabel 1.4	Pembiayaan Sebelum POJK.....	58
Table 1.5	Pembiayaan Setelah POJK.....	62
Tabel 1.6	Perbandingan Pembiayaan Sebelum dan Setelah POJK	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan ekonomi indonesia 2020.....

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....

LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2: Foto Saat Melakukan Wawancara
3. Lampiran 3: Surat Izin Riset PT.BPRS MAU Syariah
Bandar Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian pengesahan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan, judul skripsi **“Analisis Pengaruh POJK Nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pembiayaan Nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”**. Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan, atau peristiwa. Untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.¹
2. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang.²
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan yang di buat oleh suatu institusi/lembaga yang didasari oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanah

¹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-Line) tersedia di :<http://kbbi.web.id/analisis> (1 juli 2020)

²KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-Line) Tersedia di <http://kbbi.web.id/pengaruh> (2 juli 2020)

Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³

4. Stimulus adalah perangsangan organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk menjadi aktif. ⁴ Dalam hal ini stimulus dapat di artikan sebagai kebijakan untuk menjaga aktivitas keuangan pada suatu lembaga keuangan/perbankan agar tetap stabil.
5. Countercyclical yaitu tindakan-tindakan yang dapat melawan gerak siklus bisnis yang sangat merugikan perekonomian.⁵ dalam penelitian ini Countercyclical dapat diartikan sebagai suatu kebijakan guna menyanggah kerugian yang terjadi diakrnakan pertumbuhan kredit/pembiayaan suatu perbankan
6. Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) adalah sebuah virus dengan ukuran pertikel 120-160nm virus ini menginfeksi pada hewan termasuk kelelawar dan unta. Virus ini juga dapat di tularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di china dan lebih dari 190 negara. Pada tanggal 12 maret 2020 WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.

³ Pasal 1, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*

⁴ KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” (On-Line) tersedia di :<http://kbbi.web.id/stimulus> (2 juli 2020)

⁵ B. Soewantoyo, Vol. 1 *Ensiklopedi ekonomi, bisnis & managemen* (jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992), h.138

Hingga tanggal 29 maret 2020 terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.⁶

7. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu.
8. PT. BPRS Mitra Agro Usaha (MAU) Bandar Lampung adalah suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem perbankan syariah dan beralamat di jalan hayam wuruk no. 95 tanjung karang timur, bandar lampung dengan nasabah rata-rata adalah pegawai honor juga pedagang terutama yang berada di pasar seperti pasar gantung, pasar perumnas way halim, dan pasar tugu bandar lampung.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dan studi yang di pilih, maka dapat di tegaskan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.3/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 terhadap debitur pada PT. Mitra Agro Usaha (MAU) Syariah yang memiliki pembiayaan pada bank tersebut dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dikarenakan pandemi penyebaran COVID-19. Masyarakat indonesia termasuk nasabah pada PT. Mitra Agro Usaha syariah kesulitan untuk berdagang atau bekerja terlebih lagi harus melunasi kewajiban pembiayaan terhadap instansi keuangan yang bersangkutan tersebut.

⁶ Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini" *Jurnal penyakit dalam indonesia* vol.7,no. 1,maret 2020

B. Latar Belakang

Pada awal 2020, dunia mulai dikejutkan dengan mewabahnya suatu wabah penyakit baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei China yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Coronavirus adalah virus dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Sedangkan Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara⁷.

Berdasarkan dari data dinas kesehatan Provinsi Lampung 18 April 2020 tentang situasi COVID-19 di provinsi Lampung saat ini diketahui jumlah kasus positif Corona Virus Disease 2019 sebanyak 26 kasus dengan rincian, 11 orang masih dalam perawatan/isolasi, pasien sembuh bertambah 2 orang menjadi 10 orang, dan meninggal 5 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh yaitu pasien nomor 12 dan nomor 21. pasien nomor 12 merupakan perempuan asal kota Bandar Lampung dengan usia 53 tahun, dan pasien nomor 21 merupakan perempuan berusia 21 tahun hasil tracking dari pasien nomor 15. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan juga terhadap perekonomian. Masih banyak kontroversi seputar

⁷*Ibidh.* 46

penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan terhadap wabah COVID-19.

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020



Sumber: kementrian Keuangan (6, April 2020)

Melihat kondisi perekonomian yang semakin memburuk, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis. Terlihat pada gambar 2 pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2020 cukup membaik. Tetapi masuk pada kuadran kedua laju perekonomian menurun drastis, dan diprediksi hingga akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi masih melambat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3% dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Saat ini sudah banyak pihak-pihak yang melakukan tela'ah terhadap studi-studi terkait COVID-19 serta dampaknya bagi perekonomian di Indonesia yang semakin menurun dan telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Astina Sekar Bidari dengan judul “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia” Penelitian ini menggali kompleksitas serta keseuaian teori dengan data-data yang telah dihipunkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, Dalam menghadapi wabah Covid-19 dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020. Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi pembiayaan yang terkena dampak Covid-19. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga financial intermediary system tetap terjaga.⁸

Dalam kasus COVID 19, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan yang salah satunya adalah POJK nomor 11/POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai

⁸ Astina Sekar Bidari, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia” (Jurnal, Ilmu Hukum Vol.4 No.1,Maret 2020)

countercyclical dampak penyebaran COVID-19 untuk membantu debitur pada suatu instansi keuangan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap pembiayaan dalam suatu Lembaga Keuangan dan meringankan kewajiban keuangan terhadap instansi keuangan tersebut terkait pandemik covid-19 yang mewabah dan mengganggu aktivitas masyarakat ini. Dalam POJK nomor 11/POJK.3/2020 BAB I Ketentuan Umum ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud adalah Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah. UMKM yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah pembiayaan UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada suatu Lembaga Keuangan atau BANK karena debitur atau usaha terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung dan berpengaruh juga pada sektor keuangan.

Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk pembiayaan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar. Ada beberapa contoh kondisi debitur yang terkena dampak. *Pertama*, UMKM yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari maupun menuju China atau negara lain yang telah terdampak covid-19 serta *travel warning* beberapa negara. *Kedua*, UMKM yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan China ataupun negara lain yang telah terdampak virus corona. *Ketiga*, UMKM yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena

terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak covid-19⁹.

Pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, termasuk pembiayaan kepada pekerja berpenghasilan harian, pekerja informal, ojek online, pedagang, nelayan, dan lainnya akan dilakukan sesuai dengan assesmen oleh bank dan perusahaan pembiayaan. OJK pun menyatakan restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan. Dalam menanggapi hal ini, PT. BPRS Mitra Agro Usaha melakukan restrukturisasi Pembiayaan UMKM dengan memberikan perlakuan khusus untuk nasabah-nasabah yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19 sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK nomor 11/POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 dengan cara memberikan keringanan bagi nasabah yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan dengan catatan nasabah harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat tertentu karena tidak semua nasabah pada instansi tersebut terkena dampak penyebaran COVID-19 guna menjaga sifat saling tolong-menolong, menjaga kestabilan keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

⁹ Pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 11/POJK.3/2020 *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Analisis Pengaruh POJK Nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”**.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba memusatkan penelitian ini agar terfokus pada pokok pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian juga mencegah dari meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, oleh sebab itu diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11/POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019.
2. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha (MAU) syariah yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk no.95, Sawah Lama, kec. Tanjung Karang Timur, kota Bandar Lampung yang mempunyai nasabah rata-rata adalah pedagang yang secara langsung terdampak Covid-19 dan tergolong kedalam ketentuan POJK nomor 11 tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana study kasus restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui study kasus restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang di lakukan bisa bermanfaat baik untuk penulis sendiri, juga untuk orang lain. Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian yang di lakukan ini adalah seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam pemikiran yang sangat bermanfaat dibeberapa bidang keilmuan terutama pada bidang ekonomi dan perbankan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi resensi rujukan untuk penelitian lanjutan, juga menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, serta menambah pengetahuan mengenai peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya mengenai peraturan pada perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meringankan kredit/pembiayaan nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada Dunia Perbankan mengenai peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada maret 2020 yaitu Nomor 11/POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai referensi perpustakaan dan bahan acuan guna perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercycal Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif.¹⁰ Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme/enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

b. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah study kasus, yaitu metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada system tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individualnya sendiri atau suatu lembaga tertentu.¹² Pada penelitian ini akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang restrukturisasi pembiayaan dalam menanggapi POJK nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

¹⁰ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.1

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Sumber data utama dicatat melalui catatantertulis atau melalui rekaman dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.¹³Mengenai hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari bapak Miftahuddin selaku Realationship Officer pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan dokumen. Selain itu sumber data sekunder juga meliputi data profil PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berupa laporan keuangan. Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

¹³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),h. 157.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature, seperti: buku-buku cetak, artikel, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data menggunakan metode studi lapangan peneliti menggunakan teknik seperti berikut:

1). Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari narasumber pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha dengan menanyakan beberapa kejelasan tentang mekanisme dalam merestrukturisasi pembiayaan nasabah yang terdampak Coronavirus Disease 2019 setelah dikeluarkannya 11/POJK.3/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus disease 2019.

2). Observasi

Menurut Sugiyono (2015:204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu peneliti mengunjungi lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mencari informasi tambahan guna memperoleh data yang signifikan untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

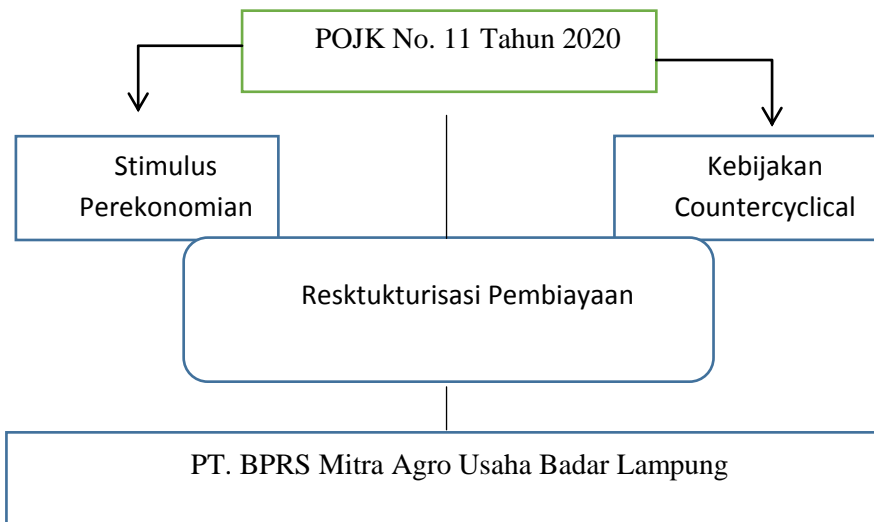
3). Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dalam dokumentasi penulis menggunakan rekaman dari hasil wawancara dengan narasumber serta menggunakan bukti-bukti lain berupa foto saat di lokasi objek penelitian yaitu PT. BPRS Mitra Agro Usaha agar bisa dijadikan acuan untuk penelitian ini dan mempelajari dokumen-dokumen mengenai pembiayaan.

H. Kerangka Pemikiran

Konsep pada penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen yaitu variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai suatu fungsi, juga tugas, serta wewenang yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap sektor didalam jasa keuangan atau perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai kebutuhan dan tuntutan di masa sekarang ini¹⁴. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan juga melindungi kepentingan masyarakat.

¹⁴Theresia Anita Christiani, 2016, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81.

a. Tugas Dan Wewenang OJK

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa pelaksanaan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Menetapkan peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan;
- 8) Menetapkan bentuk struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 1) Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Bank Syari'ah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3) Bank Umum Syariah yang selanjutnya di singkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya di singkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya di singkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015.¹⁵ Tentang produk dan aktivitas Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah “ *Kegiatan usaha bank dalam menerbitkan Produk dan melaksanakan Aktivitas harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah*”.

Dari Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tersebut, maka dapat dikaitkan bahwa Sebagai makhluk sosial manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain. Di sinilah timbul sikap saling tolong menolong yang dibutuhkan dalam rangka membantu meringankan beban

¹⁵Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015 *Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah*

satu sama lain. Karena antara manusia satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka sangat tidak pantas bila seseorang memelihara sifat sombong dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih mulia. Karena pada hakikatnya kita semua makhluk adalah yang lemah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)¹⁶

Dengan dikeluarkannya POJK ini, maka perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan stimulus yang di maksud dalam POJK tersebut adalah suatu cara untuk meredam risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas ekonomi nasional. Stimulus perekonomian ini dikeluarkan guna mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur pada suatu lembaga keuangan yang di perkirakan akan terjadi penurunan akibat pandemik covid-19.

¹⁶Al-Qur'an, 5:2

selain itu, stimulus ini juga diharapkan menjadi Countercyclical dampak penyebaran virus covid-19, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan juga menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan ketentuan (*Moral Hazard*). *Moral Hazard* terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.¹⁷ atau risiko yang di akibatkan dari ketidak bertanggung jawaban atas perbuatan. Selain itu, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debetur yang terkena dampak penyebaran covid-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debetur terkena dampak penyebaran covid-19.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai peraturan Ojk mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, kenversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur non-UMKM dan

¹⁷ Tokopedia, *Kamus Keuangan (On-Line)*, Tersedia di: <https://kamus.tokopedia.com/m/moral-hazard/>

UMKM juga diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari masing-masing bank sesuai dengan kapasitas membayar.

2. Stimulus Perekonomian

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Bentuk stimulus ekonomi untuk sektor UMKM yang telah dijalankan pemerintah melalui skema penundaan dan keringanan angsuran, pemberian mekanisme bantuan sosial, dan mekanisme pembebasan PPh atas UMKM belum dinikmati pelaku usaha UMKM secara merata. Terlihat bahwa dari rendahnya penyerapan anggaran stimulus UMKM seolah dana masih terparkir di perbankan. Menjadi urgen segera dilakukan penambahan pola kebijakan agar sektor usaha UMKM segera mendapat aliran uang tunai terutama modal kerja yang tidak semata ala bantuan sosial yang telah berjalan. Baik pemerintah dan pelaku usaha seolah berlomba dengan waktu di sisa tahun anggaran 2020

bersamaan menjalankan dan meningkatkan standar operasional penyaluran bantuan langsung ke sektor usaha UMKM. Hilangkan stigma negatif ketidakmampuan tata kelola usaha secara transparan bagi sektor usaha UMKM dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk membantu dan mendorong berjalannya sektor usaha melawan masa Covid-19. Dengan demikian, paket stimulus ekonomi yang dicanangkan pemerintah membantu sektor usaha UMKM berjalan lancar dan memberi efek multiplier sektor usaha di masyarakat dan sektor riil. Semoga kita bisa menjalankan amanah mendukung kegiatan ekonomi rakyat sebagai penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

- a. Penilaian kualitas pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk pembiayaan. Bank dapat memberikan penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas secara terpisah dengan sebelumnya
- b. Peningkatan kualitas pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Melalui stimulus tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak merosot ke tingkat yang lebih rendah.

3. Kebijakan Countercyclical

Kebijakan Countercyclical yaitu suatu kebijakan yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi

kerugian apabila terjadi pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan dampak penyebaran Corona Virus Desiase 2019 dikarenakan terhambatnya aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas seperti bekerja atau berdagang sehingga tidak bisa melakukan kewajiban keuangan pada suatu lembaga keuangan perbankan seperti membayar cicilan atau lainnya.

Dalam teori, kebijakan *countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa *booming* maupun resesi. Dalam hal ini, OJK menyiapkan tiga langkah stimulus kebijakan, yaitu:

- a. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp10 milyar, hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok atau bunga, terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona.
- b. Relaksasi pengaturan restrukturisasi Pembiayaan yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona.
- c. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga, penempatan, penyertaraan modal, penyertaraan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.¹⁸ Dalam ilmu konvensional pembiayaan biasa disebut dengan kredit, akan tetapi islam telah melarang kredit, karena kredit mengandung unsur Riba. Didalam islam sendiri memang telah melarang dengan yang namanya riba karena riba merupakan tambahan yang pasti atas tambahan pokok yang diambil pemberi kreditur (pinjaman) sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang- Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹⁸Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cetakan pertama tahun 2010), h. 681.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntaiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1). Peningkatan Ekonomi Umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses. Secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2). Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- 3). Meningkatkan produktifitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produksinya.
- 4). Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5). Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1). Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2). Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimal risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3). Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

- 4). Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

c. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah¹⁹:

- 1). Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- 2). Adanya kepercayaan Shohibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- 3). Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.

¹⁹Veithzal Rivai, Islamic Financial Management (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 4.

- 4). Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- 5). Adanya unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6). Adapun unsur resiko baik dipihak shahibul mal maupun pihak mudharib. Resiko di pihak shahibulmal adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidak mampuan bayar atau karena ketidak sediaan membayar.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan semangat usaha, menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan alat hubungan ekonomi internasional.²⁰

- 1). Meningkatkan Daya Guna Uang: Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam pesentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

²⁰Yusuf dkk, Manajemen Operasional Bank Syariah (Cirebon: STAIN Press, 2009), h. 68.

- 2). Meningkatkan Daya Guna Barang: Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goren, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
- 3). Menimbulkan Kegairahan/Semangat Berusaha: Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.
- 4). Stabilitas Ekonomi: Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas padadasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: Pengendalian inflasi, Peningkatan ekspor, Rehabilitasi prasarana, Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- 5). Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional: Para perusahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif

dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

- 6). **Pembiayaan Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional:** lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa Negara yang kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan system perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keseluruh pelosok dunia. bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu: bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antara Negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai G (Government to Government).

e. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

Dalam bahasa sehari-hari pembiayaan atau kredit sering diartikan sebagai pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan kemudian hari dengan cara cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Kredit menurut etimologi adalah kepercayaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 11 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu²¹. Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah* menjelaskan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu²²:

- 1). Pembiayaan produktif, pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dalam pembiayaan produktif dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan secara kualitatif (peningkatan kualitas hasil produksi). Berbeda halnya dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 2). Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk

²² Antonio, Muhammad Syafi'i "Bank Syariah" (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 168.

memenuhi kebutuhan tersebut. 4 Kebutuhan konsumsi dibedakan dibedakanatas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder (tambahan). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, sepertimakanan, minuman, pakaian, dan tempattinggal. Sedangkan yang berupajasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan sekunder yangberupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, dan kendaraan. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata dan hiburan.

f. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²³ Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha,yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "tijaratun rabihah, wa baa'u asysyai murabahatan" artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini "penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan

²³ Drs.Ismail,perbankan syari'ah,(Jakarta:Kencana Pernada Media Group,2011),h.105-106

keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.²⁴ Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

g. Pembiayaan akad Wakalah

Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang yang disebut pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua risiko dan tanggungjawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.²⁵ Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease suatu Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Unit Usaha Syariah Bank Umum Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

²⁴Dr.A.Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H,Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2012),h.201

²⁵Rhesa yogaswara, “konsep wakalah dalam fiqh muamalah” (16 april 2009)On-Line) Tersedia di:
<https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah>
 13 November 2020 13.05

dianjurkan untuk saling tolong menolong baik itu dengan sesama Lembaga Keuangan Syariah ataupun dengan para nasabah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ajaran Agama Islam yaitu salah satunya dengan memberikan keringanan membayar kewajiban bagi nasabah yang sedang dalam kesulitan keuangan dikarenakan terhambatnya aktivitas seperti berdagang atau bekerja ditengan pandemik Penyebaran covid-19 ini. Dengan adanya POJK nomor11/POJK.3/2020 PT. BPRS Mitra Agro Usaha Melakukan Restrukturisasi debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM guna membantu meringankan kewajiban membayar terhadap nasabah instansi keuangan terkait yang sedang dalam kesulitan keuangan dikarenakan keterbatasannya aktivitas seperti bekerja atau berdagang di tengan pandemik penyebaran Corona Virus Disease 2019 ini selain itu bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

5. Restrukturisasi

a. Pengertian

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.²⁶ Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui penurunan margin,

²⁶ Devinisi Restrukturisasi, On-Line diakses melalui: [https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit) 16 Juni 2021

perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan. Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap pembiayaan UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi bertujuan untuk menyelamatkan usaha pembiayaan UMKM agar kembali sehat. Restrukturisasi dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa UMKM masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah pembiayaannya direstrukturisasi.

b. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

1). Otoritas Jasa Keuangan

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan, “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”. dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs, tentang

restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,²⁷ sebagai berikut;

- a) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian besar atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain jadwal pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan dari sisa kewajiban yang harus dibayarkan.
- c) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning.

2). Fatwa DSN MUI Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah

Restrukturisasi pembiayaan Murabahah bisa dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a) pemberian keringanan dan potongan pelunasan saat jatuh tempo.²⁸
- b) Penjualan objek transaksi, yaitu secara prinsip objek telah menjadi milik nasabah, objek murabahah dijual melalui bank, dari hasil penjualan nasabah melunasi hutangnya kepada Bank, dan yang menjadi kewajiban atau hutang nasabah adalah sisa harga jual pokok dan

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 22

²⁸ Fatwa DSN MUI, No: 46/2005 dan No:23/2005

margin namun Bank dapat memberikan potongan pelunasan.²⁹

- c) Perpanjangan jangka waktu angsuran tidak boleh mengubah harga jual³⁰
- d) perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad murabahah terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti murabahah/musyarakah/IMBT.³¹
- e) Ta'widh, yaitu biaya rill dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan

c. SOP Restrukturisasi Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Standar Operasional atau SOP restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah nasabah yang mengalami kesulitan keuangan tetapi masih mempunyai kemampuan membayar. Selanjutnya dengan menentukan pola restrukturisasi yang tepat untuk nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 yang diharapkan tidak memberatkan bagi nasabah dalam mengangsur dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. SOP pola restrukturisasi yang dilakukan PT. BPRS Mira Agro Usaha Bandar Lampung tersebut seperti³²;

²⁹ Fatwa DSN MUI, No: 47/II/2005

³⁰ Fatwa DSN MUI, No: 48/II/2005

³¹ Fatwa DSN MUI, No: 49/II/2005

³² SOP SK Dir No. 008/kep-Dir/mau-S/III/2020 *Tentang pedoman dan kebijakan dampak penyebaran COVID-19* Tgl 30 maret 2020

- a).Angsuran menjadi 75% dari kewajiban ditunggu sampai maksimal 6 bulan.
- b).Angsuran menjadi 50% dari kewajiban ditunggu sampai maksimal 4 bulan.
- c).Angsuran menjadi 25% dari kewajiban ditunggu sampai maksimal 4 bulan.
- d).Angsuran hanya mampu membayar margin/ujroh atau bagi hasilnya maksimal 3 bulan.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis mendapat gambaran yang baik dalam menyusun kerangka fikir dengan harapan penulis dapat menyajikan penelitian yang relevan dan mudah dipahami. Tinjauan pustaka tersebut diambil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Haekal dengan judul *“Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Pelaksanaan Asuransi Di Indonesia”* penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendro Ratnanto dengan judul penelitian *“Analisis Pengaruh Kebijakan Stimulus Fiskal Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia”* dan penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asri Sekar Bidari dengan judul penelitian *“Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia”* dari ketiga penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang akan dilakukan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada table 1.1 Tinjauan pustaka berikut.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Muhammad Haekal	Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Pelaksanaan Asuransi Di Indonesia	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian ini dampak kebijakan pemerintah dalam relaksasi kredit perbankan terhadap pelaksanaan asuransi di indonesia berpengaruh kepada stabilitas pasar keuangan serta perlindungan resiko. ³³	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai objek pada penelitian. objek penelitian yang akan dilakukan adalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

³³ Muhamad Haekal yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Pelaksanaan Asuransi Di Indonesia”(Jurnal, Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2	Henrdo Ratnanto	Analisis Pengaruh Kebijakan Stimulus Fiskal Infrastrukt r Terhadap Perekonom ian Indonesia	metode penelitian pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi	Berdasarkan hasil yang diperoleh, Kebijakan stimulus fiskal insfrastrukt r berpengaruh terhadap pendapatan faktor produksi, pendapatan rumah tangga,dan pendapatan sektor produksi.pen dapatan faktor produksi mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% dan pendapatan sektor produksi mengalami pertumbuhan	Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada metode yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang berisi tentang teks naratif dari POJK.
---	--------------------	---	---	---	--

				³⁴	
3	Astina Sekar Bidari	Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia	menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggali kompleksitas serta kesesuaian teori dengan data-data yang telah dihimpun	Pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 / POJK.3 / 2020 Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19. Dengan adanya restrukturisasi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Astina Sekar Penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik dengan menambahkan study kasus pembiayaan pada suatu lembaga keuangan perbankan. Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Astina Sekar Bidari dengan menambahkan objek penelitian.

³⁴Henrdo Ratnanto yang berjudul “analisis Pengaruh Kebijakan Stimulus Fiskal Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia” (Skripsi, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia 2009)

				si yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga financial intermediary systemtetap terjaga. ³⁵	
--	--	--	--	---	--

³⁵ Astina Sekar Bidari, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia” (Jurnal, Ilmu Hukum Vol.4 No.1,Maret 2020)

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwimi Ibn Majah, *Sunan IbnMajah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 81. Hadis dari Ibn Mas'ud. Ada yang menilai hadisini *hasan*.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah* (Jakarta : Gema Insani, 2001) h. 168

Astina Sekar Bidari, "*Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia*" (Jurnal, Ilmu Hukum Vol.4 No.1,Maret 2020)

C. Soewantoyo, Vol. 1 *Ensiklopedi ekonomi, bisnis & manajemen* (jakarta: Cipta AdiPustaka,1992), h.138

Drs.Ismail, *Perbankan Syari'ah*,(Jakarta:Kencana Pernada Media Group,2011),h.105-106

Dr.A.Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H,*Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2012),h.201

Hasan Abdurahman, Asep Ririh Riswaya (Desember 2014). "*Aplikasi Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*". *Jurnal Computech & Bisnis*. 8: 63. ISSN 2442-4943

Henrdo Ratnanto yang berjudul "analisis Pengaruh Kebijakan Stimulus Fiskal Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia" (Skripsi, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia 2009)

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200511175609-17-157701/awas-ojk-sanksi-bank-debitur-main-mata-restrukturasasi>

Isnawati, wawancara dengan nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 5 Januari 2021

KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (On-Line) tersedia di:<http://kbbi.web.id/ana> 67 (Juli 2020)

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-Line) Tersedia di:<http://kbbi.web.id/pengaruh> (2 juli 2020)

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-Line) tersedia di :<http://kbbi.web.id/stimulus> (2 juli 2020)

Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) h.19

Mifftahudin, wawancara dengan karyawan bagian Realitonship Officer PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 8 September 2020

Muhamad Haekal yang berjudul “*Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Pelaksanaan Asuransi Di Indonesia*”(Jurnal, Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11.

Pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*

Pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 11/POJK.3/2020 *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015 *Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah*

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.364.

Rhesa yogaswara, “*konsep wakalah dalam fiqih muamalah*” (16 april 2009)

Ringkasan eksekutif POJK nomor 11/POJK.03/2020 (On-Line), Tersedia di:
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Per-ekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. Islamic Banking. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, CV, 2015), h. 64.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta (2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38

Susilo, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” *Jurnal penyakit dalam indonesia* vol.7, no. 1, maret 2020 vol.7, no. 1 hal 46

Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016), h. 81

Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81.

Tokopedia, *Kamus Keuangan* (On-Line), Tersedia di:
<https://kamus.tokopedia.com/m/moral-hazard>

Veithzal Rivai, Islamic Financial Managemen (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)

Wisynu Wardhana, “Instrumen Stimulus Fiskal: Pilihan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian” (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 12 No. 2, Januari 2012).